

BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAMPAK DAN SARAN
PENELITIAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada “Kajian Tentang Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mencegah dan Mengatasi *Fraud*, Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupten X”, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jenis *fraud* yang sering berpotensi terjadi pada pemerintah daerah adalah penyimpangan dalam kategori Neraca, yaitu pengelolaan asset pada proses pengadaan barang dan jasa yang menyalahi aturan. Selain itu, *fraud* juga sering berpotensi terjadi pada kategori Laporan Realisasi Anggaran, terutama dalam proses pengelolaan dana APBD, baik itu dalam penggunaan dana APBP, ataupun penggunaan langsung terhadap pendapatan daerah yang menyalahi aturan perundang-undangan.
2. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku *fraud* pada pemerintah daerah adalah terjadi kerugian keuangan keuangan daerah. Untuk *fraud* yang terungkap, baik oleh APIP ataupun auditor eksternal (BPK), kerugian keuangan daerah akan menjadi tanggung jawab pelaku *fraud*. Prilaku *fraud* yang menimbulkan kerugian keuangan daerah terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2013, dan kerugian keuangan daerah terkecil terjadi pada tahun 2014.
3. Beberapa penyebab terjadinya perilaku *fraud* pada pemerintah daerah adalah; a. Kurangnya komitmen dan kepemimpinan manajemen; b. Hubungan kerja yang kurang baik antar instansi terkait, c. Kompetensi,

integeritas dan etika dari pejabat eksekutif, pejabat legislatif, dan aparatur pemerintah daerah yang masih belum memadai, dan c. Peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang belum efektif.

4. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* yang berpotensi terjadi. Namun peran dan tanggung jawab tersebut akan lebih efektif apabila adanya : a. Komitmen bersama dalam organisasi, terutama dengan manajemen, b. Peran dan bantuan manajemen berupa *review* dari manajemen puncak, c. Dukungan organisasi terhadap sumber daya yang memadai, d. Dukungan dari pihak ketiga, seperti aduan *wistleblower*.
5. Kendala yang dihadapi APIP dalam mencegah, mendeteksi dan mengungkap *fraud* pada pemerintah daerah diantaranya: a. Belum maksimalnya penerapan prinsip independensi dan obyektivitas, b. Kurangnya keahlian yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, kompetensi teknis yang kurang memadai, serta minimnya tenaga ahli dalam menunjang penugasan, c. Tidak maksimalnya penggunaan keahlian profesional, d. Belum maksimalnya diterapkannya Kode Etik Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
6. Peran dan tanggung jawab APIP terhadap *fraud* yang terjadi ; a. APIP melaporkan *fraud* secara resmi dan tertulis dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi yang berisikan fakta dan kondisi yang ada kepada Kepala Daerah melalui pimpinan APIP. Namun jika pelaku *fraud* adalah PNS dalam instansi yang sama, dan *fraud* tersebut belum masuk ke ranah hukum, APIP cenderung menggunakan pendekatan persuasif agar

auditi bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sampai batas yang ditentukan sebelum LHP Investigasi diterbitkan, b. APIP melaporkan fakta-fakta terhadap penerapan hukum yang dilanggar, bukti-bukti yang mendukung atau melemahkan temuan, referensi wawancara atau aktifitas audit investigasi lainnya, dan hasil yang akan diperoleh. LHP Investigasi disajikan dalam bentuk ringkas, sederhana namun menyeluruh, tidak memuat opini pribadi, serta penilaian dan kesimpulan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Namun LHP Investigasi tidak diserahkan kepada aparat hukum, melainkan kepada Kepala Daerah. Apabila *fraud* tersebut masuk ke ranah hukum, APIP menyerah LHP Investigasi kepada aparat hukum setelah ada izin resmi dan tertulis dari Kepala Daerah.

1.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mode wawancara yang lebih fokus kepada beberapa informan terpilih berdasarkan intensitas penugasan audit investigasi yang pernah dilakukan. Penelitian hanya mampu menggali sebagaimana adanya, mengingat informasi yang ingin diperoleh adalah informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil penelitian.

1.3 SARAN PENELITIAN

Walau memiliki keterbatasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis *fraud* paling sering terjadi yang merugikan keuangan Negara / Daerah dengan nominal yang cukup material adalah pada pengadaan barang dan jasa kemudian

diikuti dengan penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan aturan, baik itu dari sisi penerimaan / pendapatan ataupun dari sisi pengeluaran. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan pemeriksaan BPK yang terangkum dalam arsip Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten X.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kasus *fraud* pada pengadaan barang dan jasa serta *fraud* pada pengelolaan dana APBD disebabkan karena adanya dua atau lebih pihak yang terlibat, apakah itu secara vertikal ataupun horizontal, yang dilakukan dengan inisiatif sendiri atau dalam keadaan terpaksa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *fraud* pada pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dana APBD terkait dengan masalah komitmen, kompetensi, dan integritas yang masih kurang memadai. Sedangkan penyebab *fraud* yang paling banyak terjadi dikarenakan masalah kurangnya integritas, etika, komitmen, keteladanan, rasa tanggung jawab dan itikad baik dari para pelaku *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. *Fraud* yang terjadi pada pemerintahan yang mempunyai dampak kerugian Daerah adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus dilakukan penyelamatan dan pengembalian kekayaan tersebut kepada kas Daerah. Adapun hal pertama yang perlu dilakukan adalah komitmen dari manajemen dalam menerapkan sanksi tegas dan pembinaan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, baik itu sanksi administratif ataupun sanksi penyelesaian secara hukum. Selain itu perlu

juga diterapkan penghargaan kepada para aparatur pemerintah yang telah berhasil dalam menyelamatkan asset pemerintah dari perilaku-perilaku *fraud* yang merugikan keuangan Daerah.

2. *Fraud* yang terjadi secara berulang-ulang menunjukkan adanya indikasi lemahnya unsur pengendalian intern yang disebabkan kompetensi yang masih belum memadai, baik itu pada aparat pelaksana teknis pemerintah ataupun aparat pengawas intern pemerintah. Untuk itu perlu adanya dukungan dari seluruh unsur pemerintahan, terutama sekali dimulai dari pihak pimpinan guna mendukung peningkatan kompetensi dan sumber daya pengelola pemerintahan pada unit pelaksana teknis dan unit pengawasan intern pemerintah. Usaha peningkatan ini dimulai dari proses perekrutan PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan untuk peningkatan pengetahuan & keahlian, serta dukungan terhadap peningkatan sarana keterampilan dan pengalaman aparatur pemerintahan.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebab yang paling banyak terjadi adalah kurangnya nilai integritas dan nilai etika meliputi kejujuran, budaya kerja, komitmen, kepemimpinan, dan perilaku bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang terus berkesinambungan dalam membenahan nilai-nilai tersebut, agar masing-masing aparatur pemerintahan bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan jujur, berani, penuh kreatifitas, bertanggung jawab, serta komitmen pada tujuan pemerintah yang *good governance* dan *clean government* dalam mengelola asset Daerah untuk pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. 2006. *Report To The Nation on Occupational Fraud & Abuse*. http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/2006-rtn.pdf (diakses tanggal 26 April 2015)
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Agung. 2015. *Pengaruh Orientasi Etika Organisasi Terhadap Perilaku Etis Akuntan*. Universitas Negeri Padang. Padang
- Aldiani, Witjaksono. 2014. *Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Fraud (Kecurangan Akuntansi) (Suatu Studi Pada PT KTM)*. Jurnal. Binus University. Jakarta.
- Amrizal, 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor internal*. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi BPKP, Jakarta.
- Amrizal. 2010. *Pemberantasan Korupsi yang Efektif Melalui Penerapan Unsur-Unsur SPIP*. Warta Pengawasan 2010. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Warta Pengawasan, Vol.XVII No.3, September 2010. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
- Amrizal. 2011. *Pemberantasan Korupsi yang Efektif Melalui Penerapan Unsur-Unsur SPIP*. Selembayung Pengawasan, Edisi Mei 2011. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
- Apriadi dan Fachriyah. (2014). *Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan*. Jurusan Akuntansi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Arifuddin, Anik, Wahyuddin. 2002. *“Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap terhadap Perubahan Organisasi (Studi empiris terhadap dosen Akuntansi pada perguruan tinggi Islam Swasta di Malang dan Makassar)”*. Prosiding SNA V. Semarang.
- Astuti, P. Juni 2012 Research. *Peran internal audit dan komite audit dalam mewujudkan Good Corporate Governance*. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi. Surakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2009. *Fraud Auditing*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Bogor.

- Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)*
- Bambang Hartadi. 1999. *Auditing: Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*. BPF. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Visi Global Media.
- Black's Law Dictionary. *What is FRAUD ?* <http://thelawdictionary.org/fraud/> (diakses tanggal 2 November 2015)
- Chariri. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dewi dan Apandi. 2012. *Gejala Fraud dan Peran Auditor internal Dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif)*. Jurnal. Prodi Pendidikan Manajemen Bisnis. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Dewi, S. 2014. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal pada Kecurangan Akuntansi (studi eksperimen pada Pemerintah daerah Propinsi Bali)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Dinapoli, Thomas P. 2010. "Management's Responsibility for Internal Control". Division of Local Government and School Accountability, Office of the New York State Comptroller. New York
- Eddy. 2011. *Penyimpangan dan Kecurangan Serta Dampaknya Terhadap Kerugian Keuangan Negara. (Suatu Studi Eksploratif Terhadap Laporan Hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Barat)*. Tesis. Universitas Andalas. Padang
- Efendy, T, *Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo) Januari 2010*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Engko Cecilia dan Gudono. 2007. *Pengaruh kompleksitas tugas dan locus of control terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja auditor*. JAAI VOLUME 11 NO 2:105-124. Yogyakarta.
- Falah. 2006. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika*. Tesis. Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Faturrahman. 2008. *Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Kas pada Industri Tekstil di Rancaekek Kabupaten Bandung*. Percikan Vol.91.
- Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*. Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hendriani, Firman. 2013. *Pengaruh Pendidikan Latihan dan Kompetensi Terhadap Implementasi SPIP Guna Pencegahan Fraud*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.1
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. *Pertimbangan Pengendalian Intern Dalam Audit Laporan Keuangan*. PSA No.69 SA Seksi 319.
- Koroy. 2008. *Pendeteksian Fraud Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal*. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, VOL. 10, NO. 1, MEI : 22-33*. STIE Nasional Banjarmasin. Banjarmasin
- Kurniawan. 2012. *Persepsi Auditor Internal Terhadap Deteksi Fraud*. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol.1, No.2. Unika Widya Mandala. Surabaya
- Kurniawati. 2013. *Peranan Manajemen dan Inspektorat Jenderal Terhadap Pengendalian Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Agama*. Fakultas Ekonomi Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, 2009. Yogyakarta.
- Masalamate. 2013. *Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi Pemerintah*. Fakultas Komunika . Universitas Multi Media Nusantara. Tangerang.
- Mulyadi, dan Kanaka, P. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho. 2012. *“Studi Fonomologi tentang Peran Akuntan dalam Masyarakat: Melayani Kepentingan Publik atau Kepentingan Klien”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurjanah. 2008. *Pengaruh Budaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pattipawae. 2011. *Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja dan Prinsip-Prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik dan Benar*. Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli –September 2011.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta
- Pratiwi. 2012. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern*. Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukitting, Vol. XII No. 2, September 2012.
- Randal J.E, Mark S.B, Alvin A.A, Amir A.J. 2012. *Jasa audit dan Insurance*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Santoso, Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.4, No.1, FISIP – UNPAR.
- Schein, Edgar H. 2002. *Organizational Culture and Leadership*, Third Edition. Jossey –Bass Publishers, San Francisco.
- Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition. Wiley Corporate F&A.
- Statement on Auditing Standards No. 99. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*.
- Stoner *et al.* 1996. *Manajemen*. Jilid II, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Sudaryati. 2009. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor Internal dalam Mendukung Good Corporate Governance*. Jurnal Sosial dan Budaya Edisi Vol.2 No.2. FE Universitas Muria Kudus. Kudus
- Sugioyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Suhercita. 2014. *Materi Perkuliahan Akuntansi Forensik dan Fraud Auditing*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang
- Sukanto. 1991. *Pengajaran Etika Profesional*. Makalah Seminar Pengajaran Audit Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sukanto. 2007. *Perbandingan Persepsi Antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan Audit Kecurangan (Fraud Audit), dan Profil Auditor Kecurangan (Fraud Auditor)*. Tesis. Unviversitas Diponegoro. Semarang.

Sulistiyowati. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Syafruddin. 2005. *Kasus Mulyana dalam Perspektif Etika*. Suara Merdeka. April hal.6

Syamsiatun dan Wafirah. 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Philosophy, Ethics and Local Wisdom in the Moral Construction of the Nation Geneva. Globethics.net

Tuanakotta. 2014. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Edisi 2, Penerbit Salemba. Jakarta.

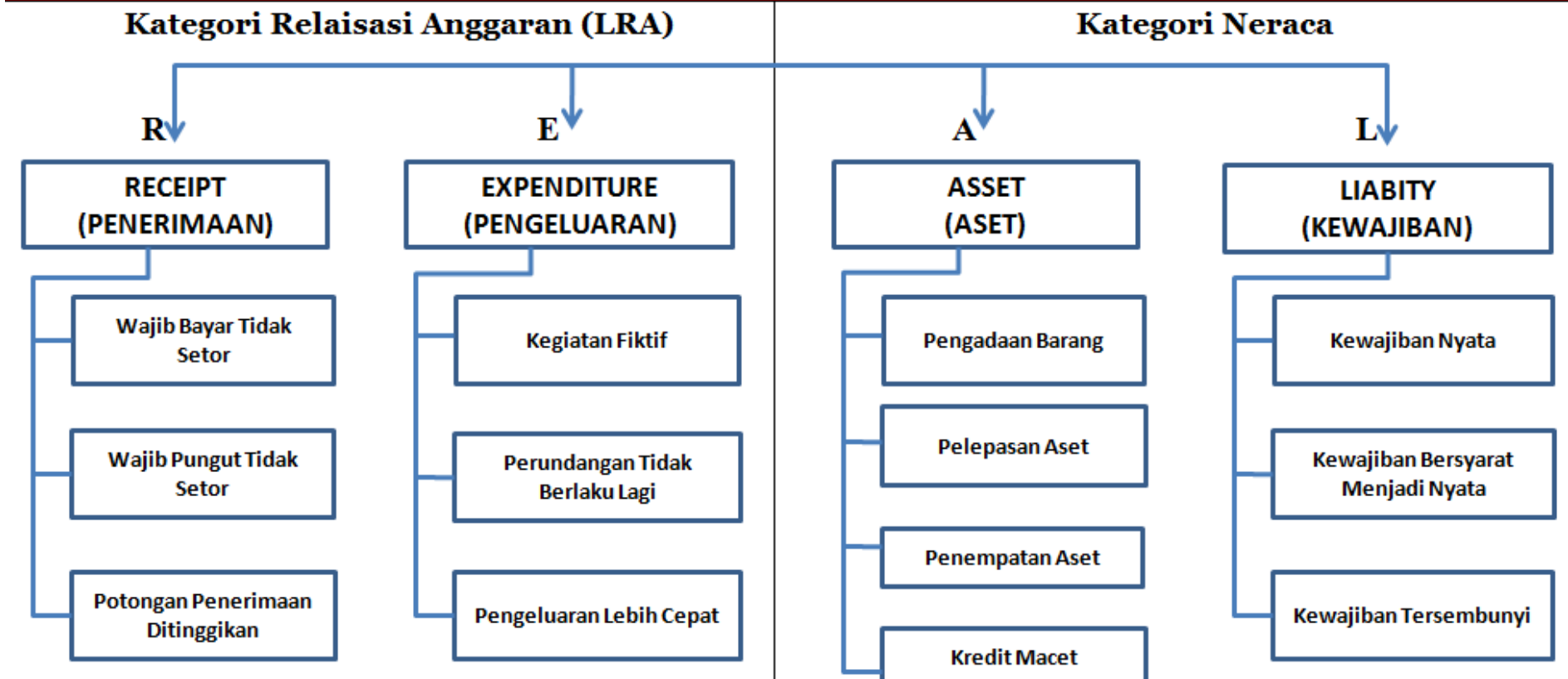
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Zimbelman, Albrecht *et al* . 2014. *Akuntansi Forensik*. Edisi 4, Penerbit Salemba. Jakarta.

Zulkarnain. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.



Pohon Kerugian Negara (R.E.A.L Tree)



Sumber : Pohon Kerugian Negara, Theodorus M Tuanakoota (2014)

